TAJUK RENCANA

Efektivitas Belajar dari Rumah

Sejak 31 Maret 2020, pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar secara nasional. Di daerah, kebijakan itu diterapkan sesuai kondisi masing-masing.

Dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) itu, yang paling nyata terlihat adalah pembatasan jam sekolah dan jam kerja. Di DKI Jakarta, kebijakan belajar dari rumah atau bekerja dari rumah untuk menekan penyebaran virus korona jenis baru dilakukan sejak pertengahan Maret 2020.

Seperti diberitakan, pandemi Covid-19 diperkirakan tidak berhenti dalam waktu dekat. Untuk mengantisipasi perpanjangan masa darurat, khususnya terkait kebijakan belajar dari rumah, perlu dirumuskan ulang model pembelajaran jarak jauh di sekolah (*Kompas*, 27/4/2020).

Sejak pertama kali diberlakukan, kebijakan belajar dari rumah tak diikuti arahan teknis pelaksanaannya, bergantung pada kreativitas guru dan pimpinan sekolah. Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 tak menyebutkan bagaimana belajar dari rumah dilakukan.

SE itu menyatakan, belajar dari rumah lewat pembelajaran dalam jaringan (daring)/jarak jauh untuk memberi pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, terkait kecakapan hidup, dan aktivitasnya bervariasi tergantung minat siswa serta kondisi dan kesenjangan akses/fasilitas pendidikan. Belajar dari rumah tak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum.

Kemendikbud memiliki laman guruberbagi, selain puluhan laman terkait pendidikan. Namun, laman itu tak sepenuhnya diakses guru, siswa, atau orangtua siswa dengan berbagai alasan. Tak ada laporan terukur mengenai pelaksanaan pembelajaran secara daring. Komisi X DPR menilai di DKI Jakarta pembelajaran dengan metode ini secara penuh tak efektif.

Bisa dipahami, model belajar dari rumah secara daring tak efektif sebab selama ini, sesuai data Kemendikbud tahun 2017, lebih dari 49,3 juta siswa pada jenjang pendidikan dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah menjalani model pembelajaran secara tatap muka. Sedikit sekali yang belajar secara daring. Mayoritas dari sekitar 7,5 juta mahasiswa di negeri ini belajar secara tatap muka meski tahun 1984 didirikan Universitas Terbuka dengan metode pembelajaran jarak jauh.

Efektivitas belajar dari rumah secara nyata mulai terjawab saat Kemendikbud menggandeng TVRI mulai 13 April 2020, menayangkan program Belajar dari Rumah. Rating TVRI pada periode 12-18 April 2020 naik 622 persen, menjadi 15,85, serta menjadi yang tertinggi secara nasional. Padahal, rating minggu sebelumnya hanya 2,23. Budaya menonton dan "tatap muka" nyata masih kuat melekat pada diri masyarakat negeri ini.

Masa pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19 di negeri ini berpotensi diperpanjang. Kebijakan belajar dari rumah perlu ditata lebih baik lagi, dengan memuat arahan teknis serta mempertimbangkan kondisi daerah, akses, dan fasilitas sekolah, maupun siswa. Pelibatan masyarakat, termasuk media massa, untuk mendukung kebijakan belajar dari rumah pun bisa dilakukan untuk efektivitas pendidikan.

Krisis Yaman Kian Mendalam

Pernyataan sepihak dari Dewan Transisi Selatan bagi kemerdekaan Yaman Selatan menyiratkan kegagalan koalisi Arab Saudi mengelola mereka.

Konflik di Yaman berawal dari kegagalan Presiden Ali Abdullah Saleh, yang berkuasa sejak Yaman bersatu pada 1990, mengalihkan kekuasaan kepada Wakil Presiden Abdurabbuh Mansour Hadi menyusul Musim Semi Arab tahun 2011. Sejak itu, Hadi membuat kesepakatan dengan berbagai pihak, termasuk kelompok jihadis, pemberontak di selatan, dan loyalis Saleh, untuk mengatasi korupsi, pengangguran, dan kekurangan pangan.

Kelompok Syiah Houthi, yang sebelumnya bermusuhan dengan pemerintahan Saleh, mengambil keuntungan dengan merebut beberapa kota, hingga pernah menduduki San'a, ibu kota Yaman. Bersama kelompok Sunni, dan aparat yang setia kepada Saleh, Houthi bisa "mengusir" Hadi ke luar dan kemudian menetap di Arab Saudi pada Maret 2015.

Arab Saudi bersama negara-negara Teluk membentuk koalisi untuk memerangi Houthi di Yaman. Koalisi ini mendapat bantuan persenjataan dari Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. Namun, hingga empat tahun berselang, koalisi belum juga bisa melumpuhkan Houthi dan kawan-kawan.

Dewan Transisi Selatan (STC) terbentuk sebulan setelah Hadi memecat Gubernur Aden Aidarus al-Zoubaidi karena diduga memiliki agenda tersembunyi, yakni memprioritaskan gerakan kemerdekaan Yaman Selatan. Terdiri atas 26 anggota, STC mencakup lima gubernur dari Yaman Selatan dan dua mantan menteri pada masa pemerintahan Saleh.

Pada Agustus 2019 muncul bentrokan antara pasukan Hadi yang didukung Arab Saudi dan STC yang diketahui didukung Uni Emirat Arab (UEA). STC menuduh Hadi salah kelola dan memiliki hubungan dengan kaum jihadis.

Konflik Yaman telah menewaskan puluhan ribu orang, sebagian besar warga sipil. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari 24 juta orang Yaman, atau lebih dari dua pertiga populasi, membutuhkan bantuan. PBB menggambarkan konflik Yaman sebagai "krisis kemanusiaan terburuk di dunia". Pada 10 April 2020, Yaman mengumumkan kasus pertama virus korona baru di selatan. Yaman kekurangan peralatan untuk menghadapi pandemi.

Juru bicara STC, Alkhader Sulaiman, kepada Al Jazeera mengatakan, pernyataan kemerdekaan Minggu (26/4/2020) tidak muncul tiba-tiba. "Ini tumpukan salah urus, salah kelola, terutama di Yaman Selatan, bahkan Yaman Selatan telah menjadi Houthi (baca: Syiah) hanya dalam waktu kurang dari empat tahun," ujar Sulaiman yang kini tinggal di AS.

Pernyataan kemerdekaan ini enam bulan setelah Arab Saudi membuat kesepakatan dengan pemerintah Hadi dan STC di Riyadh. Wajar Arab Saudi menolaknya. Perbedaan pandangan antara Arab Saudi dan UEA terkait peran STC, dan kritik terhadap Arab Saudi yang memimpin koalisi, ikut mempercepat keluarnya pernyataan ini. Akankah Arab Saudi bisa menghadapi dua front langsung, Houthi di utara dan STC di selatan? Kini Yaman terancam kembali terpecah dua.

KOMPAS
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965

Pemimpin Umum: Jakob Oetama
Wakil Pemimpin Umum: Lilik Oetama, Budiman Tanuredjo
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ninuk Mardiana Pambudy
Wakil Pemimpin Redaksi: Mohammad Bakir, P. Tri Agung Kristanto, Sutta Dharmasaputra
Redaktur Senior: Ninok Leksono, Rikard Bagun
Redaktur Pelaksana: Adi Prinantyo
Wakil Redaktur Pelaksana: Marcellus Hernowo, Antonius Tomy Trinugroho, Haryo Damardono
Sekretaris Redaksi: Subur Tjahjono, Ilham Khoiri

Korona dan Ketahanan Ekonomi

Ari Kuncoro
Rektor Universitas Indonesia

Salah satu perkembangan menarik dalam pencegahan wabah Covid-19 adalah beberapa negara yang melakukan *lockdown*, seperti Spanyol dan Italia, mulai berpikir untuk melakukan relaksasi setelah mengklaim telah melihat puncak atau *plateau* dari jumlah kasus positif baru, meninggal, dan sembuh.

Di Spanyol, pekerja di sektor manufaktur dan konstruksi, berjumlah sekitar 300.000 orang, diperbolehkan kembali bekerja mulai 13 April lalu. Pengujian menjadi alat penting untuk mengetahui siapa yang dapat kembali bekerja, siapa yang tidak. Italia mengharapkan dapat mengakhiri *lockdown* akhir April. Desakan untuk membuka perekonomian terutama timbul dari perwakilan empat daerah industri di Italia utara, tempat terparah dengan 45 persen produk domestik bruto (PDB) dihasilkan. Sementara di seberang Lautan Atlantik, di tengah pandemi yang belum mereda, Presiden AS Donald Trump merencanakan membuka perekonomian 1 Mei, walaupun kelayakan waktunya terus jadi perdebatan.

Ancaman resesi dunia

Kecenderungan itu tidaklah mengherankan karena hajat hidup orang banyak juga terancam. Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi akan terjadi kontraksi pertumbuhan global minus 3 persen di 2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia ini yang terburuk sejak Depresi Besar 1930-an atau bahkan lebih buruk. Beberapa negara industri akan mengalami pertumbuhan negatif: Spanyol (minus 8 persen), Italia (minus 9,1 persen), Inggris (minus 6,5 persen), Perancis (minus 7,2 persen), Jepang (minus 5,2 persen), Jerman (minus 7 persen), dan AS (minus 5,9 persen).

Paul Romer, peraih Nobel Ekonomi 2018, dalam wawancara di TV berita terkemuka AS menyarankan perlunya dilakukan penyeimbangan antara masalah kesehatan dan kemaslahatan ekonomi, seraya memperingatkan ekonomi AS akan memasuki depresi besar jika pada permulaan Mei 2020 tetap dalam situasi *lockdown* seperti sekarang. Dengan demikian, harus dicari cara lain yang lebih menyeimbangkan antara pemutusan rantai wabah dan menjaga momentum pertumbuhan yang diperlukan agar AS tak terperosok ke jurang depresi dengan tingkat pengangguran 30 persen, mengingat sampai pertengahan Maret jumlah aplikasi tunjangan menganggur sudah 10 juta orang.

Berbagai contoh di atas menunjukkan dilema yang dihadapi pemerintah dalam menghadapi wabah ini. Semula ada anggapan dengan *lockdown*, penularan akan dapat dihentikan dan perekonomian akan pulih dalam waktu relatif singkat dengan pola huruf V, apalagi dunia sebelumnya sudah diterpa perang dagang AS-China. Yang jadi masalah, *lockdown* yang tak direncanakan dengan baik dan terlalu lama akan membawa kerusakan bahkan kehancuran pada rantai pasokan. Banyak hal yang tak diketahui tentang virus ini untuk menduga berapa lama wabah ini akan berlangsung.

Fakta yang baru adalah mutasi virus Covid-19 menjadi tiga varian A, B, dan C. Hal lain adalah berapa proporsi populasi yang terinfeksi. Masih terbatasnya pengambilan sampel untuk dites menyulitkan untuk menduga parameter porsi populasi yang terinfeksi sehingga masih merupakan fenomena gunung es, yang terlihat hanya puncaknya. Dalam hal ini, Romer menyarankan dilakukan uji Covid-19 yang lebih luas, mengisolasi yang positif, bagi yang negatif dipersilakan bekerja. Menurut dia, dalam jangka panjang strategi ini akan lebih murah dibandingkan opsi *lockdown* dan perekonomian masih dapat berjalan.

Konvergensi kebijakan

Dalam wawancara yang lain, ketua bank sentral AS kantor wilayah Minneapolis, Minnesota, mengatakan, harapan akan terjadinya solusi cepat sudah hampir tak mungkin mengingat banyak misteri dari wabah ini yang harus dijawab. Perang kilat (*blitzkrieg*) melawan pandemi sukar terwujud, yang akan terjadi adalah perjuangan yang membutuhkan kesabaran melalui perang semesta dengan semua sumber daya yang ada (*all-out*). Bukan lagi lari sprint 100 meter, melainkan lebih seperti lari maraton yang butuh strategi dan stamina.

Pendekatan yang akan dipakai adalah seperti tarik ulur bermain layangan: kencangkan (*control*) ketika kasus meningkat (*flare-up*), lalu kendurkan lagi ketika perekonomian hampir mati tercekik, kencangkan lagi jika kasus positif meledak lagi, lalu kendurkan lagi, demikian seterusnya sampai wabah berlalu. Hal ini dilakukan mengingat perekonomian butuh ruang dan waktu untuk bernapas sekadar untuk bertahan.

Yang menarik, terjadi semacam konvergensi dari negara yang tak memilihnya, seperti Jepang dan Swedia, dengan negara seperti Spanyol, Italia, dan Austria yang memilih *lockdown* total. Jepang yang semula tidak *lockdown*, pada 7 April sudah mengumumkan keadaan darurat kesehatan, tetapi tetap tanpa *lockdown*, untuk tujuh dari 47 prefektur, termasuk Tokyo dan Osaka. Pertimbangan untuk tetap tak *lockdown* adalah keterkaitan antara satu perusahaan, satu sektor, dengan yang lain dalam satu rantai nilai (*chain value*) makin meningkat seiring kemajuan ekonomi.

Ketergantungan timbal balik ini menyebabkan perekonomian akan sulit dipulihkan jika ada mata rantai yang jatuh atau dikorbankan. Hal ini bahkan berpotensi meruntuhkan seluruh mata rantai permintaan-pengeluaran masyarakat dan sisi pasokan, seperti halnya kartu domino. Waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan akan sangat lama, dikenal dengan pemulihan ala huruf L. Jepang tak lagi mengharapkan pemulihan cepat seperti huruf V, tetapi lebih dengan semboyan "tidak mengapa tak terlalu cepat, yang penting asal *kelakon*", dikenal dengan pola pemulihan huruf U.

Pemulihan dan rantai pasokan

Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi besar yang dimulai pada akhir 1997 dan berlangsung sampai 1999. Pada triwulan I-1998 pertumbuhan PDB masih positif 1,08 persen, tetapi untuk ketiga triwulan berikutnya berturut-turut mencatat pertumbuhan negatif sehingga rerata untuk 1998 adalah minus 8,19 persen. Di tahun 1999, dua triwulan pertama pertumbuhan PDB masih negatif dua digit dan baru positif kembali di triwulan III dan IV sehingga rerata untuk 1999 adalah minus 4,94 persen. Dibutuhkan lima triwulan untuk pertumbuhan menjadi positif lagi dengan pola campuran antara U dan V.

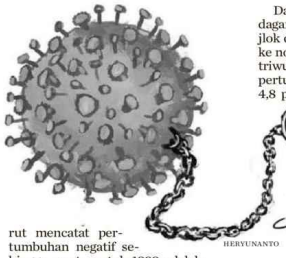

Pola pemulihan ini ditentukan oleh dua sektor terbesar di dalam PDB, yaitu manufaktur dan perdagangan. Jika dilihat lebih rinci, hanya sektor perdagangan yang menunjukkan pemulihan cepat berbentuk huruf V. Sempat mengalami pertumbuhan minus 28,6 persen, tetapi dalam waktu dua triwulan sudah kembali mencatat pertumbuhan positif 1,1 persen. Hal ini terjadi karena walaupun krisisnya dalam, rantai pasokan relatif terjaga. Sektor perdagangan ritel mempunyai rantai pasokan yang didominasi entitas usaha kecil dan mikro di sektor informal. Entitas-entitas ini mempunyai jaringan lokal yang praktis hanya sedikit terpengaruh perekonomian global yang justru mampu membuatnya bertahan (Turner, 2002).

Industri manufaktur memiliki pola campuran antara U dan V dengan kecepatan pemulihan lima triwulan. Pola ini ditentukan oleh cabang industri yang terbesar, yaitu industri makanan yang didominasi UMKM serta mempunyai kaitan ke depan dengan sektor perdagangan, sekaligus kaitan ke belakang dengan sektor pertanian. Industri makanan membutuhkan hanya tiga triwulan untuk kembali tumbuh positif dengan pola V. Pola yang sama terjadi pada cabang manufaktur lain yang pada umumnya punya pola U yang pada umumnya membutuhkan waktu pemulihan lebih lama. Sebagai contoh, tekstil, yang membutuhkan waktu lebih lama, yaitu empat triwulan untuk pulih dengan pola campuran U dan V. Urutan lama pemulihan di atas mengikuti hierarki kebutuhan ala Maslow (1943), mulai dari kebutuhan pokok, pangan, kemudian sandang, dan seterusnya.

Krisis keuangan global (GFC) di 2008 punya dampak cukup signifikan ke Indonesia walaupun dampak negatifnya tak seperti krisis 1998. Pertumbuhan PDB turun signifikan, tetapi masih dalam rentang positif. Penyebabnya, sebagian besar efek bonanza komoditas masih membawa momentum positif hingga 2012. Pertumbuhan PDB triwulanan turun dari 6,25 persen di triwulan III-2008 menjadi di bawah 5 persen di dua triwulan pertama 2009. Pertumbuhan baru pulih di atas 5 persen pada triwulan III-2009. Sektor manufaktur ikut terimbas dengan pertumbuhan di bawah 2 persen, untuk tiga triwulan berturut-turut sejak triwulan I-2009.

Dampak GFC terhadap sektor perdagangan lebih parah. Pertumbuhan anjlok dari 5,5 persen di triwulan IV-2008 ke nol persen, bahkan negatif untuk dua triwulan berikutnya. Namun kemudian pertumbuhannya pulih dengan cepat ke 4,8 persen di triwulan III-2009. Sekali lagi sektor perdagangan menunjukkan kemampuan untuk pulih cepat ala huruf V sama seperti di krisis sebelumnya asalkan rantai pasokan dan transportasi logistik tidak terganggu.

Belajar dari pengalaman

Indonesia memilih urut-urutan penguatan habitat sisi permintaan dan penawaran masyarakat terlebih dulu, baru kemudian menuju kedaruratan kesehatan dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB paling sedikit meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan, keramaian; pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; dan pembatasan jumlah dan lalu lintas orang dengan kendaraan umum ataupun pribadi, tetapi masih mengizinkan pergerakan logistik.

Sebagai penjaga habitat PSBB, untuk menjaga daya beli masyarakat di sisi permintaan, pemerintah menyediakan Rp 405 triliun untuk menanggulangi dampak Covid-19, di antaranya terdiri dari dana kesehatan Rp 75 triliun, insentif perpajakan Rp 70,1 triliun, dan jaring pengaman sosial Rp 110 triliun, dan dukungan pembiayaan anggaran Rp 150 triliun. Relaksasi kredit UMKM yang diumumkan OJK merupakan salah satu contoh memelihara rantai pasokan. Dua skenario pemerintah tentang dampak Covid-19 terhadap perekonomian, yaitu buruk dengan pertumbuhan positif 2,3 persen, dan sangat buruk dengan pertumbuhan minus 0,4 persen, mencerminkan seberapa jauh rantai pasokan terutama di sektor informal, baik di sektor perdagangan maupun manufaktur, dapat dijaga dalam situasi kedaruratan kesehatan.

Dalam kebijakan publik sangat penting mengetahui respons dan motivasi dari pihak yang akan terkena kebijakan dalam perancangan kebijakan. Bahwa PDB dan juga lapangan kerja di Indonesia sebagian besar ditopang oleh sektor informal adalah fakta. Dalam krisis 1998, ketika sektor korporasi berjatuhan, mereka tetap bertahan karena memang hanya dengan bertahan mereka dapat melanjutkan penghidupan. Sektor informal inilah yang berperan sebagai penyangga pemulihan pada masa-masa setelah krisis sebelum akhirnya bonanza komoditas mengangkat Indonesia kembali. Pembuat kebijakan harus memahami bahwa rancangan kebijakan harus sesuai naluri dasar mereka, yaitu tetap bertahan hidup. Tanpa itu, kebijakan akan mempunyai kredibilitas rendah.

Seperti halnya setiap kebijakan, akhirnya yang diperlukan adalah koordinasi dan implementasi sehingga perlu petunjuk teknis dan pelaksanaan untuk pelaksana di lapangan. Selain itu, kredibilitas PSBB ditentukan oleh koordinasi dan kerja sama berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah. Hanya dengan ini pemutusan rantai penularan wabah dan pemulihan ekonomi paling tidak akan terjadi seperti huruf U, atau campuran antara U dan V, bukan seperti pola L.

Covid-19 dan Teori Konspirasi

Fidelis Regi Waton
Pengajar Filsafat di Sankt Augustin, Jerman

Manusia lazimnya menagih penjelasan kausal berkaitan dengan kejadian yang menggemparkan. Seputar Covid-19 muncul pelbagai hoaks dan teori konspirasi. Kubu anti-China dipelopori AS menuding Covid-19 rekayasa genetika laboratorium biologis di Wuhan. Beberapa studi faktual membantah tuduhan ini dengan menempatkan virus pembunuh ini dalam konteks evolusi alam berdasarkan prinsip mutasi dan seleksi.

Garis pro-China mempropagandakan Covid-19 sebagai senjata biologis AS demi mematahkan tendensi hegemoni global ekonomi China. Iran kembali mendendangkan *refrain* klasik antisemitisme. Israel ditilik berada di balik krisis korona (*Zionist lobby*). Banyak portal media sosial mengaitkan korona dengan trik bestialis mereduksi populasi manusia dengan dalih ekonomis. Industri farmasi juga tak luput dari obyek curiga sebagai arsitek virus demi pemasaran vaksin.

Di Belanda dan Inggris berkembang klaim Covid-19 diakibatkan radiasi teknologi 5G. *De Telegraaf* memberitakan imbas anggapan ini, berupa pembakaran menara jaringan telekomunikasi dimaksud.

Teori konspirasi sudah lazim dalam panorama sejarah. Mendaratnya Apollo ke-11 di Bulan dianggap difilmkan di padang gurun. Ketika wabah sampar melanda Eropa segera dicari kambing hitam. Bangsa Yahudi terperangkap konstruksi *enemy image* (gambar musuh). Mereka dicurigai meracuni sumur. Tuduhan ini kelak melegitimasi kekerasan terhadap warga berdarah Yahudi. Serangan ke menara kembar World Trade Center dilihat sebagai *inside-job* pemerintahan Bush. Perang Irak dilandasi tuduhan kolaborasi antara Saddam Hussein dan jaringan teror Al Qaeda.

Banyak yang menyangsikan penjelasan resmi atas suatu kejadian. Para dirigen teori konspirasi memanfaatkan peluang di tengah keraguan ini. Mereka menyajikan ulasan alternatif yang relatif jelas, simpel, dan instan. Prinsip *Ochkham'Razor* (pisau cukur Ockham) diberlakukan, artinya penjelasan paling sederhana diambil. Karena Covid-19 pertama kali menyebar di pasar hewan Wuhan, hal itu dilabel *made in China*.

Berdasar sumber tak valid, dikutip pernyataan yang konon dituturkan Bill Gates bahwa vaksinasi adalah cara terbaik mengurangi populasi. Gates lalu didakwa dalang Covid-19.

Model *storytelling* ini begitu menarik dan cepat menyapa dan dicerna. Siapa percaya akan teori konspirasi, ia beranggapan ada segelintir orang yang diam-diam merencanakan aksi kriminal. Kiat tak bermoral ini dirakit begitu apik demi menguntungkan protagonisnya sekaligus merugikan manusia dan alam. Begitu ekspres dikumandangkan dramaturgi antagonistik tetan dan musuh, baik dan jahat, kita dan mereka.

Berpikir kritis

Mengapa teori konspirasi begitu populer, atraktif, dan selalu laris dikonsumsi biarpun ia sangat dangkal dari sudut pandang epistemologi? Para konsumen hipotesis konspiratif tak selamanya orang yang masih berpikir mistis dan esoterik. Mereka yang hidup dalam masyarakat dengan taraf pendidikan tinggi dan peradaban modern tidak selamanya otomatis mendiskualifikasikan diri dari perangkap teori konspirasi.

Jawaban pertama atas popularitas teori konspirasi adalah fenomena gangguan mental. Tentu saja paranoid memiliki tingkat berbeda-beda. Psikolog Robert Brotherton dari Universitas London menemukan korelasi antara kepribadian patologis dan kepercayaan pada teori konspirasi. Penjelasan kedua berhubungan dengan fakta irasionalitas manusia biarpun ia didefinisikan *animal rationale* (makhluk berakal budi). Sejarah umat manusia yang wajar dibentuk oleh progresivitas intelek. Dengan kapasitas budinya manusia selalu berusaha menelusuri problematikanya dengan tepat dan kredibel. Sayangnya, kemampuan nalar ini bisa bergerak regresif. Orang begitu gampang termakan isu, *fake news*, teori konspirasi, pandangan sempit, sesat, dungu.

Percaya teori konspirasi pada prinsipnya sangat manusiawi. Manusia memang rentan terhadap irasionalitas dan rumor. Desas-desus dipercayai karena orang malas berpikir. Meski begitu, aspek kemanusiawian kita tak terbatas di sana. Berpikir kritis juga termasuk kapasitas kita yang manusiawi. Pendidikan formal dan nonformal bersasaran mengasah kekritisan kognisi kita. Berpikir kritis akan cepat melihat keanehan dan absurditas teori konspirasi.

Insan yang kritis tak begitu saja mengadopsi penjelasan resmi yang diterima umum (*common explanation*) tentang suatu kasus. Apa yang diterima umum tak selamanya harus benar. Kita tak diwajibkan percaya *common explanation*. Namun, setiap penjelasan yang bertentangan dengan *mainstream* juga bukan otomatis berarti teori konspirasi. Pribadi yang berpikir kritis akan skeptis dan mempertanyakan kembali segala informasi yang masuk dan bukannya menelan semuanya. Ia akan melakukan *check* dan *re-check* demi mendekati argumen dan fakta yang lebih sahih. Dengan pisau kritisnya, ia sanggup membedakan antara fiksi dan fakta, opini dan laporan, hoaks dan kebenaran.

Insan yang percaya teori konspirasi tak jeli membedakan kualitas sumber informasi. Baginya, informasi medsos lebih bernilai dari hasil riset lembaga ilmiah. Krisis Covid-19 mungkin sebagai kesempatan untuk kembali memperkuat kepercayaan kita terhadap sains.

POJOK

Bisnis ruang perkantoran anjlok.
Efek bisa kerja dari rumah.

◆

Sejumlah daerah terapkan jam malam.
Gelap, lebih baik di rumah saja.

◆

Kebijakan PSBB tak cukup menekan pandemi.
Harus simultan dengan program lain.

Mang Usil